BAB I

PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Rencana kerja merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana kerja mengandung tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang realistis untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Renstra tahun 2021 – 2026.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra*)* Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Oleh Karena itu pelaksanaan pembangunan sub sektor peternakan dan perkebunan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Gowa, serta Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Rencana kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa tahun 2021–2026, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2 021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus tetap sinkron dengan capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan Provinsi dan Nasional, maka dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Gowa.

Proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Penjabaran teknis RPJMD, disusun Renstra Perangkat Daerah sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, maka setiap Perangkat Daerah akan menyusun Rencana Kerja tahunan berupa Rencana Kerja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

* 1. **Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.
11. Peraturan Bupati Gowa Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa
12. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tentang Rencana Strategi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026
    1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun 2023 disusun dengan maksud untuk penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan program dan kegiatan peternakan dan perkebunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran RKA/DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan.
2. Sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan.
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan, menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat
4. Sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja kepala dinas setiap tahun anggaran dengan menggunakan empat tolok ukur, yaitu : masukan *input*, keluaran *output*, hasil *outcome*, dan dampak *impact*
   1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan rencana kerja dinas peternakan dan perkebunan tahun 2023.

Hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu, dengan memuatevaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan denganmemuattelaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Penutup denganmemuat pedoman transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan, serta kaidah pelaksanaan dalam penjabaran rencana kerja dan anggaran dinas peternakan dan perkebunan.

**BAB II**

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PETERNANAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2021

#### Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dan pencapaian RENSTRA perangkat daerah sampai dengan tahun 2021, evaluasi rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah.

Dokumen perencanaan rencana kerja tahun 2023 merupakan capaian dan evaluasi seluruh program dan kegiatan tahun 2021 yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perkebunan. dalam evaluasi rencana kerja tahun 2021 sudah ada persamaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2022, dalam dokumen perencanaan rencana kerja tahun 2023 ini didasarkan nomenklatur program dan kegiatan baru. Adapun dokumen perencanaan rencana kerja tahun 2023 yang disandingkan dengan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Perkebunan serta

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Gowa





Berdasarkan data tabel 2.1. target dan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 pada umumnya berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100% sub sektor peternakan dan perkebunan, Bahkan program peningkatan produksi unggulan perkebunan yaitu kopi, cengkeh, kakao, kelapa, jambu mete dan lada dengan capaian kinerja mencapai 94,99%, ini disebabkan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan, pemeliharaan tanaman perkebunan yaitu pemberian pupuk dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan. Namun demikian khusus produksi tanaman kakao cenderung berfluktuatif, ini disebabkan pemeliharaan tanaman tidak dilakukan dengan baik seperti pengendalian hama dan penyakit serta minat masyarakat untuk memelihara tanamannya sangat minim bahkan cenderung mengganti dengan tanaman lainnya.

Pencapaian kinerja sektor peternakan pada tahun 2020 telah mencapai target RPJMD pelayanan kesehatan hewan yaitu 65.000 ekor, kinerja dinas bisa mencapai sebanyak 65.000 ekor (100,00%) dengan rincian jumlah ternak yang divaksin sebanyak 63.500 ekor dan jumlah ternak yang diobati sebanyak 1.500 ekor, ini disebabkan karana kami fokus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk pelanyanan kesehatan hewan dengan maksimal. Sedangkan peningkatan populasi ternak sapi juga mencapai target sebesar 101.57% atau sebanyak 121.163 ekor, hal ini tercapai atas keberhasilan kegiatan Inseminasi Buatan dan program asuransi ternak sapi. Kegiatan inseminasi buatan ini dapat menambah populasi dan produktivitas ternak, begitu pula asuransi usaha ternak sapi memberikan jaminan pelaku usaha ternak sapi untuk lebih giat memelihara ternaknya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perkebunan**

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas disentralisasi dalam bidang peternakan dan perkebunan, dalam melaksanakan tugas, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perkebunan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perkebunan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Peternakan dan Perkebunan belum memiliki Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dinas Peternakan dan Perkebunan memiliki tahapan serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Gowa baik dari kelompok tani peternakan/perkebuan maupun usaha bidang peternakan/perkebuan. Dinas Peternakan dan Perkebunan menggunakan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai acuan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan pelayanan terhadap petani/ peternak.

Jenis pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ijin usaha peternakan/perkebunan, memfasilitasi peternak/petani/pengusaha bidang peternakan dan perkebunan dengan memberikan rekomendasi teknis untuk ijin usaha yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu agar selanjutnya dapat diproses di tingkat Pemerintah Kabupaten.
2. Pelayanan ijin pemotongan hewan, memfasilitasi dengan memberikan rekomendasi ijin pemotongan hewan.
3. Pelayanan rekomendasi kredit, memfasilitasi para peternak/ petani/pengusaha bidang peternakan dan perkebunan dengan memberikan rekomendasi ke bank pelaksanaan/kredit program dengan total pelayanan rekomendasi kredit.
4. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berfungsi sebagai salah satu persyaratan administratif pengiriman hewan ternak antar kota di wilayah Kabupaten Gowa.
5. Pelayanan kesehatan hewan, memberikan pelayanan kesehatan hewan baik itu secara aktif maupun pasif.
6. Pelayanan Rumah Potong Hewan, menyediakan pelayanan rumah potong hewan bagi hewan ternak yang memenuhi persyaratan kesehatan pada pemeriksaan ante mortem dan didukung oleh surat keterangan kepemilikan ternak
7. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), melakukan pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan bila ada laporan ternak yang birahi.
8. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB),
9. Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ATR)

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan perkebunan, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Perkebunan;
2. Keterbatasan anggaran operasional dalam melaksanakan tugas -tugas pelayanan;
3. Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis peternakan, perkebunan dan penyuluh;
4. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya peternakan maupun perkebunan di tingkat petani/peternak;
5. Terbatasnya permodalan yang dimiliki petani/peternak;
6. Terbatasnya akses terhadap informasi harga pasar produk peternakan dan perkebunan oleh petani/peternak;
7. Terbatasnya pemanfaatan limbah hasil pertanian/peternakan;
8. Belum memadainya informasi pemetaan potensi peternakan dan perkebunan;
9. Keberpihakan perbankan terhadap pengembangan peternakan dan perkebunan yang masih rendah;
10. Masih lemahnya penegakkan hukum dalam dunia usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan;
11. Masih lemahnya kelembagaan kelompok petani/peternak;
12. Potensi sumberdaya alam yang mendukung bagi pengembangan peternakan dan perkebunan di Kabupaten Gowa;
13. Meningkatnya kebutuhan produk asal ternak dan hasil perkebunan yang berkualitas;
14. Terbukanya pangsa pasar untuk produk asal ternak dan hasil perkebunan baik segar maupun olahan;
15. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi budidaya dan pengolahan produk peternakan dan perkebunan;
16. Terbatasnya kualitas bahan pangan asal hewan, dan memenuhi standar pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
17. Masih munculnya wabah penyakit menular pada ternak khususnya *Anthraks*;
18. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman khususnya pada tanaman kakao;
19. Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan perkebunan dan nilai tambah yang diterima petani/peternak dalam usahanya.

**2.4. Review Terhadap RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021, merupakan gambaran rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dalam mencapai indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa 2021 – 2026.

Sedangkan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan merupakan penjabaran Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2022, yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2021 – 2026 ditambah dengan usulan program kegiatan masyarakat yang dapat diakomodasi pada usulan program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022, seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | | | | | Catatan Penting |
| Program/ Kegiatan | | | Lokasi | Indikator Kinerja | | Target Capaian | | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | | Lokasi | | Indikator Kinerja | | Target Capaian | | Kebutuhan Dana |  |
| (Rp. 000) | (Rp. 000) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| I | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | |  | **Cakupan pelayanan administrasi perkantoran** | |  | |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | |  | | **Cakupan layanan jasa penunjang** | | 4 jenis | |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | | | Sungguminasa | Jumlah Jaringan | | 3 jaringan | | 70,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | | | Sungguminasa | | Jumlah jaringan yang tersedia | | 3 jaringan | | 54,669,989 |  |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas | | | Sungguminasa | *Jumlah kendaraan dinas* | | 2 unit | | 62,100,000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | | Sungguminasa | | Jumlah kendaraan dinas | | 1 unit | | 41,435,858 |  |
| 3 | Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | | | Sungguminasa | *Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor* | | 4 paket | | 49,721,800 | Penyediaan bahan Logistik kantor | | | Sungguminasa | | jumlah jenis logistik kantor yang tersedia | | 4 jenis | | 42,165,852 |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | Sungguminasa | | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | | 2 buah | | 5,446,860 |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | | | Sungguminasa | | Jumlah alat listrik yang tersedia | | 23 buah | | 1,394,874 |  |
| 4 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah | | | Sungguminasa | *Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan* | | 275 kali | | 140,377,500 | Penyelenggaraan rapat koorddinasi dan konsultasi SKPD | | | Sungguminasa | | Jumlah koordinasi dan konsultasi | | 933 OH | | 325,104,000 |  |
| 5 | Pelayanan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor | | | Sungguminasa | *Jumlah kegiatan penunjang ketatausahaan kantor* | | 707 peserta | | 201,165,000 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | Sungguminasa | | jumlah orang | | 27 orang | | 133,490,000 |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | | | Sungguminasa | | Jumlah jenis bahan bacaan | | 5 jenis | | 6,000,000 |  |
| 6 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Sungguminasa | *Jenis Gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya* | | 9 jenis | | 6.029.356.531 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Sungguminasa | | Jenis Gaji dan tunjangan yang diproses pencairannya | | 9 jenis | | 6,029,356,531 |  |
| 7 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Sungguminasa | *Jenis layanan umum perangkat daerah* | | 23 jenis | | 380,111,586 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Sungguminasa | | Jenis layanan umum perangkat daerah | | 23 jenis | | 380,111,586 |  |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Sungguminasa | *Jenis layanan jasa Penunjang* | | 4 jenis | | 188.159.989 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Sungguminasa | | Jenis layanan jasa Penunjang | | 4 jenis | | 188,159,989 |  |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | Sungguminasa | *Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara* | | 3 unit | | 47.285.858 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | | Sungguminasa | | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | | 3 unit | | 47,285,858 |  |
| II | **Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur** | | |  | **Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.** | |  | |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | |  | | **Cakupan layanan jasa penunjang** | |  | |  |  |
| 10 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | Sungguminasa | *jumlah perlengkapan gedung yang tersedia* | | 9 unit | | 7,200,000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | Sungguminasa | | *jumlah perlengkapan gedung yang tersedia* | | 9 unit | | 0 |  |
| 11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Sungguminasa | *jumlah gedung terpelihara* | | 2 gedung | | 52,110,150 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Sungguminasa | | *jumlah gedung terpelihara* | | 2 gedung | | 0 |  |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | Sungguminasa | *jumlah peralatan yang terpelihara* | | 12 unit | | 5,600,000 | Pemeliharanaan peralatan dan mesin lainnya | | | Sungguminasa | | *jumlah peralatan yang terpelihara* | | 9 unit | | 5,850,000 |  |
| III | **Program Peningkatan Sarana Disiplin Aparatur** | | |  | **Cakupan peningkatan disiplin aparatur** | |  | |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |  | **Cakupan layanan jasa penunjang** | |  | |  |  |
| 13 | Pengadaan Mesin / Kartu Absensi | | | Sungguminasa | *jumlah mesin absensi yang tersedia* | | 1 unit | | 5,000,000 | Pengadaan Mesin / Kartu Absensi | | | | Sungguminasa | *jumlah mesin absensi yang tersedia* | | 1 unit | | 0 |  |
| 14 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | | Sungguminasa | *Jumlah pakaian untuk ASN* | | 150 pasang | | 63,750,000 | Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur | | | | Sungguminasa | *Jumlah pakaian untuk ASN* | | 150 pasang | | 63,750,000 |  |
| IV | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | | |  | **Cakupan pelayanan administrasi sistem pelaporan** | |  | |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | |  | **Cakupan layanan jasa penunjang** | |  | |  |  |
| 15 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Sungguminasa | *Lancarnya pelaporan kinerja dinas* | | 4 dokumen | | 27,305,000 | Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah | | | | Sungguminasa | *jumlah laporan dan dokumen* | | 4 dokumen | | 39,181,500 |  |
| 16 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | Sungguminasa | *Lancarnya pelaporan keuangan akhir tahun* | | 1 dokumen | | 12,269,250 | Administrasi Keuangan | | | | Sungguminasa | *jumlah dokumen* | | 1 dokumen | | 13,900,000 |  |
| 17 | Penyusunan statistik perencanaan | | | Sungguminasa | *Tersedianya statistik perencanaan* | | 1 dokumen | | 11,876,500 |  | | | |  |  | |  | | 0 |  |
| V | **Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan** | | |  | **persentase peningkatan produksi perkebunan** | |  | |  | **Program Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian** | | | |  | **persentase peningkatan produksi perkebunan** | |  | |  |  |
| 18 | Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan | | | Kecamatan Tompobulu | *Tersedianya sarana produksi perkebunan* | | 57.785 kg pupuk | | 174,000,000 | Pengawasan penggunaan Sarana pertanian | | | | Kecamatan Tompobulu | *jumlah kelompok yang menerapkan paket teknologi* | | 2 kelompok | | 0 |  |
| 19 | Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana Perkebunan (DAK) | | | 18 kecamatan | *Terbangunnya/Terehabilitasinya sarana dan prasarana perkebunan* | | 4 Unit | | 755,466,625 |  | | | |  |  | |  | | 0 |  |
| 20 | Pembangun- an rasarana Pertanian | | | Kab. Gowa | *Jumlah prasarana pertanian yang di bangun* | | *13 unit* | | 2.945.000.000 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | Kab. Gowa | Jumlah prasarana pertanian yang di bangun | | 13 unit | | 2.945.000.000 |  |
| 21 | Pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan | | | Kecamatan Parigi dan Bungaya | *Jumlah kelompok tani yang melakukan pengendalian OPT* | | 2 kelompok | | 48,210,000 | Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan | | | | Kecamatan Biringbulu | *Jumlah kelompok tani yang melakukan pengendalian OPT* | | 2 kelompok | | 0 |  |
| 22 | Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan | | | Kecamatan Bt.lempangan | *Tersedianya Pohon induk bibit tanaman perkebunan* | | 0.50 ha | | 31,105,200 | Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan | | | | Kecamatan Bt.lempangan | *Kebun bibit unggul yang terpeliiharan* | | 0,50 ha | | 0 |  |
| 23 | Rehablitasi Lahan dan Tanaman Perkebunan | | | Kecamatan Tombolopao | *Jumlah bibit siap tanam/ salur* | | 40.000 batang | | 0 | Rehablitasi Lahan dan Tanaman Perkebunan | | | | Kecamatan Tombolopao | *Jumlah bibit siap tanam/ salur* | | 40.000 batang | | 0 |  |
| VI | **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan** | | |  | **Persentase peningkatan produksi perkebunan** | |  | |  | **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan** | | | |  | **Persentase peningkatan produksi perkebunan** | |  | |  |  |
| 24 | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan | | | Bungaya, Bontolempa-ngan, Biringbulu, Tompobulu | *Jumlah kelompok tani yang dibina untuk penerapan pasca panen* | | 30 kelompok | | 45,165,000 | Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan | | | | Kecamatan Tompobulu, dan Tinggimoncong | *jumlah kelompok tani yang dibina untuk penerapan pasca panen* | | 30 kelompok | | 0 |  |
| VII | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | | |  | *Persentase pemanfaatan teknologi perkebunan* | |  | |  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | | | |  | *Persentase pemanfaatan teknologi perkebunan* | |  | |  |  |
| 25 | Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern | | | Bungaya, parigi, Bonto-lempangan Tinggimoncong, Tombolopao, Tompobulu. | *Jumlah kelompok tani yang menerapkan pengolahan secara modernn* | | 5 kelompok | | 69,314,000 | Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern | | | | Bungaya, parigi, Bontolempa-ngan Tinggi-moncong, Tombolopao, Tompobulu. | *Temu usaha dan promosi hasil perkebunan* | | 5 kelompok | | 0 |  |
| 26 | Penyediaan saana dan prasarana Pengolahan hasil Perkebunan | | | Kecamatan TompoBulu, Tombolopao, Tinggi Moncong, dan Parigi | *Jumlah kelompok tani pengolah hasil perkebunan yang di bina* | | 30 kelompok | | 56,401,500 | Penyediaan saana dan prasarana Pengolahan hasil Perkebunan | | | | Kecamatan TompoBulu, Tombolopao, Tinggi Moncong, dan Parigi | *Jumlah kelompok tani pengolah hasil perkebunan yang di bina* | | 30 kelompok | | 0 |  |
| VIII | Program Pemberdaya-an Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | | |  | *persentase pemberdayaan penyuluh* | |  | |  | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | | | |  | *persentase pemberdayaan penyuluh* | |  | |  |  |
| 21 | Orientasi Terknis dan Lokakarya Penyusunan programa penyuluhan Pertanian | | | 18 Kecamatan | *meningkatnya kinerja penyuluh di lapangan* | | 35 orang | | 16,286,000 | Orientasi Terknis dan Lokakarya Penyusunan programa penyuluhan Pertanian | | | | Sungguminasa | *Jumlah peserta lokakarya* | | 15 orang | | 0 |  |
| IX | Program Pencegahan dan Penanggu-langan Penyakit Ternak | | |  | *persentase pelayanan kesehatan hewan* | |  | |  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | |  | *persentase pelayanan kesehatan hewan* | |  | |  |  |
| 22 | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | | | 18 Kecamatan | *Jumlah ternak yang divaksin* | | 8.000 ekor | | 95,297,500 |  | | | |  |  | |  | | 0 |  |
| 23 | Pembinaan Puskeswan | | | 18 Kecamatan | *jumlah hewan yang diobati* | | 1.500 ekor | | 53,497,000 |  | | | |  |  | |  | | 0 |  |
| 24 | Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan | | | 18 Kecamatan | *Pengawasan bahan pangan asal hewan menjelang lebaran* | | 2 kali | | 47,305,000 | Pengawasan dan Pembinaan Rumah Potong Hewan | | | | 18 Kecamatan | *Pengawasan bahan pangan asal hewan menjelang lebaran* | | 2 kali | | 46,704,000 |  |
| 25 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 18 Kecamatan | *Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan* | | 65.000 ekor | | 197.022.500 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 18 Kecamatan | *Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan* | | 7.000 ekor | | 98.022.500 |  |
| X | Program Peningkatan Hasil Peternakan | | |  | *persentase peningkatan produksi peternakan* | |  | |  | Program Penyediaan dan Pengembangan Saran Pertanian | | | |  | *persentase peningkatan produksi peternakan* | |  | |  |  |
| 26 | Pembinaan ternak bantuan pemerintah | | | 18 Kecamatan | *Terdistribusinya hasil ternak bantuan pemerintah* | | 75 ekor | | 18,308,000 | Pembinaan ternak bantuan pemerintah | | | | 18 Kecamatan | *Jumlah kelompok binaan* | | 9 kelompok | | 0 |  |
| 27 | Peningaktan Inseminasi Buatan | | | 18 Kecamatan | *Meningkatnya ternak hasil kelahiran Inseminasi Buatan* | | 500 ekor | | 117,606,500 |  | | | |  |  | |  | | 0 |  |
| 28 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota | | | 18 Kecamatan | *Meningkatnya ternak hasil kelahiran Inseminasi Buatan* | | 500 ekor | | 26.208.800 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 18 Kecamatan | *jumlah kelahiran ternak sapi hasil Inseminasai Buatan* | | 500 ekor | | 119,450,000 |  |
| 29 | Pengembangan Perbibitan Hijauan Makanan Ternak | | | 18 Kecamatan | *Meningkatnya sumber bibit hijauan makanan ternak* | | 20.000 stek | | 48,583,250 | Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan ternak | | | | Kecamatan Parangloe | *Jumlah stek hijauan pakan ternak* | | 20.000 stek | | 0 |  |
| 30 | Pendataan Statistik Peternakan | | | 18 Kecamatan | *Tersedianya data statistik peternakan* | | 1 dokumen | | 25,584,500 | Pendataan Statistik Peternakan | | | | 18 Kecamatan | *Tersedianya data statistik peternakan* | | 1 dokumen | | 0 |  |
| 31 | Pengemba-ngan Populasi ternak unggas | | | Kecamatan Bajeng Barat dan Barombong | *Jumlah ayam buras yang diserahkan kepada kelompok tani* | | 200 ekor | | 0 | Pengembangan Populasi ternak unggas | | | | Kecamatan Bajeng Barat dan Barombong | *Jumlah ayam buras yang diserahkan kepada kelompok tani* | | 200 ekor | | 0 |  |
| XI | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | | |  | *persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan* | |  | |  | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | | | |  | *persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan* | |  | |  |  |
| 32 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | | | 18 Kecamatan | *Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna* | | 5 kelompok | | 17,321,750 | Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna | | | | Kecamatan Manuju dan Bontomarannu | *jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna* | | 5 kelompok | | 17,321,750 |  |
| XII | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | | |  | *persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan* | |  | |  | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | | | |  | *persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan* | |  | |  |  |
| 33 | Pembinaan Usaha Ternak | | | 18 Kecamatan | *Meningkatnya pelayanan dan pembinaan usaha peternakan* | | 50 orang | | 23,293,000 | Pembinaan Usaha Ternak | | | | 18 Kecamatan | *Jumlah unit usaha/ kelompok usaha yang terbina* | | 50 orang | | 23,293,000 |  |
| XIII | Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan | | |  | *Persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan* | |  | |  | Program Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan | | | |  | *Persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan* | |  | |  |  |
| 34 | Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan | | | 18 Kecamatan | *Tersedianya sarana dan prasarana peternakan* | | 5 unit | | 700,000,000 | Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peternakan | | | | 18 Kecamatan | *jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/ direhab* | | 5 unit | | 700,000,000 |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  | | Sungguminasa, 18 Februari 2022 | |
|  |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sungguminasa, 8 Oktober 2021 | | | | Kepala Dinas | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | **SUHRIATI, SE. M.Si.** | |  | | **Pangkat : Pembina Utama Muda** | | | | **NIP. : 19660220 198603 2 001** | | | | | | | | | Kepala Dinas |  |





**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2023 ini dimulai dari Forum Organiasai Perangkat Daerah, Forum Organiasai Perangkat Daerah merupakan sarana musyawarah untuk merencanakan pembangunan peternakan dan perkebunan di Kabupaten Gowa. Forum ini terdiri dari para pelaku peternakan dan perkebunan diantaranya pengusaha, kelompok tani, praktisi bidang peternakan/perkebunan dari perguruan tinggi. Hasil musyawarah ini diperoleh program-program yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang kemudian disimpulkan berdasarkan prioritas untuk Program Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023, yang diusulkan melalui Sistem Informasi Pembangungan Daerah (SIPD) oleh kelurahan/desa yang telah diverifikasi oleh Bappeda dan Kecematan sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.3. Hasil Deteksi Usulan Musrenbang (*Aspirasi*) di SIPD Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa



**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**

**3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sasaran utama Direktorat Jenderal Peternakan adalah meningkatnya ketersediaan produk daging, telur, dan susu serta meningkatnya kontribusi produk ternak dalam negeri yang mencakup:

a) Meningkatnya ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas dengan memanfaatkan sumberdaya lokal;

b) Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak ruminansia dengan memanfaatkan sumberdaya lokal;

c) Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak non ruminansia dengan memanfaatkan sumberdaya lokal;

d) Meningkatnya derajat kesehatan ternak dan wilayah bebas penyakit;

e) Menurunnya derajat kontaminan dan residu produk hewan;

f) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan prioritas pada Direktorat Jenderal Peternakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu dalam produksi daging sapi, dikemas dalam satu program prioritas, sehingga terdapat enam kegiatan dalam menunjang tupoksi dan satu kegiatan prioritas yakni Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Output kegiatan ini adalah meningkatnya ketersedian daging sapi domestik sebesar 90 persen. Untuk merealisasikan pencapaian swasembada daging sapi maka dilakukan kegiatan Upaya Khusus Sapi Betina Bunting.

Sedangkan sasaran strategis umum Direktorat Jenderal Perkebunan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan meliputi :

1) Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional;

2) Peningkatan diversifikasi pangan berbasis komoditas perkebunan yang difokuskan pada pengembangan komoditas sagu dalam rangka penganekaragaman pangan perkebunan, kegiatan integrasi tanaman perkebunan dan ternak, pengembangan kegiatan tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan / hortikultura / perkebunan lainnya dan pemanfaatan tanaman sela;

3) Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan 16 komoditas unggulan perkebunan yakni tebu, kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, teh, lada, cengkeh, pala, jambu mete, nilam, kapas, tembakau, kemiri sunan dan sagu;

4) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku *bio-energy* dan pengembangan pondasi sistem pertanian *bio-industry* dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman dan ternak serta penyediaan benih kemiri sunan;

5) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integritas/komitmen, kejujuran, konsistensi dan bebas KKN;

6) Peningkatan pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari pencapaian sasaran strategis lainnya.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan**

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 adalah Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sub sektor peternakan dan sub sektor perkebunan

Sedangkan sasaran Dinas Tahun Anggaran 2023 yaitu :

1. Meningkatnya populasi dan produktivitas ternak
2. Meningkatnya mutu dan hasil produksi komoditas unggulan perkebunan

**3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2023, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Gowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) | | | |
| Kinerja Program/ Kegiatan | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 27 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | *Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  | 100.00% | 8,899,853,951 |  |
| 3 | 27 | 01 | 2 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN* | Somba Opu | 100.00% | 5,576,000,256 | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | Somba Opu | 56 orang / bulan | 5,576,000,256 | APBD II |
| 3 | 27 | 01 | 2 | 05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Tersedianya laporan administrasi kepegawaian* | Somba Opu | 100.00% | 45.000.000 | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | *Jumlah Pakaian dinas yang tersedia* | Somba Opu | 60 pasang | 45.000.000 | APBD II |
| 3 | 27 | 01 | 2 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Tersedianya logistik dan Laporan Adminstrasi umum* | Somba Opu | 100.00% | 199,267,099 | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan* | Somba Opu | 4 paket | 25,244,099 | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | Somba Opu | 60 eksamplar | 6,000,000 | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Somba Opu | 200 Laporan | 168,023,000 | APBD II |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 27 | 01 | 2 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | Somba Opu dan Tombolopao | 30 unit | | 2,356,525,700 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Somba Opu | 3 unit | | 381,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Somba Opu dan Tombolopao | 27 unit | | 1,975,525,700 | APBD II | |
| 3 | 27 | 01 | 2 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah* | Somba Opu | 100.00% | | 673,431,744 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan* | Somba Opu | 1 laporan | | 54,658,788 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan* | Somba Opu | 1 laporan | | 618,772,956 | APBD II | |
| 3 | 27 | 01 | 2 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | *Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | Somba Opu | 100.00% | | 99,629,152 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | Somba Opu | 2 unit | | 38,629,152 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | *Jumlah peralatan dan mesin yang Dipelihara* | Kab. Gowa | 5 unit | | 50,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | *Jumlah sarana dan prasarana yang Dipelihara* | Kab. Gowa | 3 unit | | 11,000,000 | APBD II | |
| 3 | 27 | 02 |  |  | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | *Persentase Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peranian* |  | 100.00% | | 86,208,800 |  | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah kelompok tani pengguna sarana pertanian yang terawasi | Kabupaten Gowa | 35 kelompok tani | | 10,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 10,000,000 | APBD II | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | Jumlah kelahiran ternak sapi hasil IB yang tertangani | Kabupaten Gowa | 500 ekor sapi | | 26,208,800 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Kabupaten Gowa | 1 dokumen | | 26,208,800 | APBD II | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 03 | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan | Tersedianya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan | Kabupaten Gowa | 100% | | 20,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 10,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/ Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 10,000,000 | APBD II | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 04 | Pengawasan Obat Hewan | Tersedianya pengawasan obat hewan | Kabupaten Gowa | 100% | | 10,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 10,000,000 | APBD II | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak | Tersedianya pengawasan benih/bibit ternak dan pakan ternak, serta dijamin sesuai standar | Kabupaten Gowa | 100% | | 10,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 10,000,000 | APBD II | |
| 3 | 27 | 02 | 2 | 06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Kabupaten Gowa | 100% | | 10,000,000 | APBD II | |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain | Kabupaten Gowa | 100 ton | | 10,000,000 | APBD II | |
| 3 | 27 | 03 |  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peranian |  | 100.00% | | 5,615,250,000 |  | |
| 3 | 27 | 03 | 2 | 02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah prasarana perkebunan dan peternakan yang dibangun | Kabupaten Gowa | 34 unit | | 5,571,250,000 | DAK | |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara | Kec. Biringbulu, Tinggimoncong, Bungaya, Tombolopao, parangloe, Bontolempangan, Bontonompo, dan Bontonompo Selatan | 5 unit | | 831,250,000 | DAK | |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Kec. Parigi, Tinggimoncong, Tompobulu, Biringbulu, dan Bontolempangan | 4 unit | | 600,000,000 | DAK | |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Biringbulu, Tombolopao, Tompobulu, Bontomarannu, Palangga, Bontolempangan, Bungaya, Parangloe dan Bontonompo Selatan | 5 unit | | 1,500,000,000 | DAK | |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Kabupaten Gowa | 1 unit | | 120,000,000 | DAK | |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | Jumlah Long Storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | Kabupaten Gowa | 1 unit | | 120,000,000 | DAK | |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | *Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara* | Kec. Sombaopu, Bajeng, dan Bontomarannu | 3 unit | | 900,000,000 | | DAK |
|  |  |  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara* | Kec. Parigi, Tombolopao, Tompobulu, Tinggimoncong, dan Pattallassang | 15 unit | | 1,500,000,000 | | DAK |
| 3 | 27 | 03 | 2 | 03 | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan rumpun/Galur Ternak | *Luas wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak* | Kabupaten Gowa | 2 ha | | 22,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | *Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan* | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 22,000,000 | | APBD II |
| 3 | 27 | 03 | 2 | 04 | Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum | *Luas lahan pengembalaan umum* | Kabupaten Gowa | 2 ha | | 22,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | *Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum* | Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 22,000,000 | | APBD II |
| 3 | 27 | 04 |  |  | **PROGRAM PENGEDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | *Persentase Kinerja Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner* |  | 100.00% | | 208,088,800 | |  |
| 3 | 27 | 04 | 2 | 01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular | *Tersedianya hewan yang bebas wabah penyakit hewan menular* | 18 Kecamatan Kabupaten Gowa | 7.000 ekor | | 98,088,800 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | *Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis* | 18 Kecamatan Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 98,088,800 | | APBD II |
| 3 | 27 | 04 | 2 | 02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | *Tersedainya pengawasan hewan dan Produk hewan masuk dan keluar* | 18 Kecamatan Kabupaten Gowa | 100% | | 20,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | *Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan* | 18 Kecamatan Kabupaten Gowa | 1 laporan | | 20,000,000 | | APBD II |
| 3 | 27 | 04 | 2 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner | *Tersediaya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner* | Kec. Somba Opu dan Bontomarannu | 100% | | 40,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | *Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium* | Kec. Somba Opu dan Bontomarannu | 1.000 Sampel | | 20,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | *Jumlah Pelayanan Jasa medik veteriner* | Kec. Somba Opu dan Bontomarannu | 1.000 kali | | 20,000,000 | | APBD II |
| 3 | 27 | 04 | 2 | 04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Tersedianya pengawasan hewan yang sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner* | Kec. Somba Opu (RPH) | 100% | | 15,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan Kabupaten/Kota | *Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota* | Kec. Somba Opu (RPH) | 1 laporan | | 15,000,000 | | APBD II |
| 3 | 27 | 04 | 2 | 05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | *Tersedianya pengawasan hewan yang sesuai dengan persyaratan teknis kesejahteraan hewan* | 18 Kecamatan | 100% | | 15,000,000 | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | *Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan* | Kec. Somba opu | 1 laporan | | 15,000,000 | | APBD II |
| 3 | 27 | 05 |  |  | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase Kinerja Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |  | 100.00% | **20,000,000** | | |  |
| 3 | 27 | 05 | 2 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | *Jumlah kelompok binaan yang melakukan pengedalian dan penanggulangan bencana pertanian* | 9 kecamatan dataran tinggi | 10 kelompok | 20,000,000 | | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | 9 kecamatan dataran tinggi | 40 Ha | 20,000,000 | | | APBD II |
| 3 | 27 | 06 |  |  | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | *Persentase Kinerja Program Perizinan Usaha Pertanian* |  | 100% | 30,000,000 | | |  |
| 3 | 27 | 06 | 2 | 01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian | Persentase izin usaha perkebunan yang difasilitasi terhadap usulan masyarakat | 7 Kecamatan | 80.00% | 15,000,000 | | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 7 Kecamatan | 1 dokumen | 15,000,000 | | | APBD II |
| 3 | 27 | 06 | 2 | 01 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Persentase keterangan usaha peternakan yang difasilitasi untuk mendapatkan izin usaha | 18 Kecamatan | 40 % dari jumlah Usaha | 15,000,000 | | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi | 18 Kecamatan | 1 laporan | 15,000,000 | | | APBD II |
| 3 | 27 | 07 |  |  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Kinerja Program Penyuluhan peranian |  | 100.00% | 14,479,000 | | |  |
| 3 | 27 | 07 | 2 | 01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan penyuluhan | 18 Kecamatan | 100 kelompok tani | 14,479,000 | | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 18 Kecamatan | 100 unit | 14,479,000 | | | APBD II |
|  |  |  |  |  | Jumlah |  |  |  | 14,923,880,551 | | |  |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN**

Rencana Kerja serta indikasi kebutuhan pendanaan Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2023 pada tabel 4.1. ini.

Tabel 4.1. Rencana kerja dan indikasi kebutuhan pendanaan Tahun 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE | | | | | | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 27 | 01 |  |  | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 8,974,853,951 |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 |  | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,576,000,256 |
| 3 | 27 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5,576,000,256 |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 |  | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 45.000.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 45.000.000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 |  | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 224,267,099 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25,000,000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25,244,099 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,000,000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168,023,000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 |  | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah | 2,356,525,700 |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 381,000,000 |
| 1 | | | | | 2 | | 3 |
| 3 | 27 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 1,975,525,700 |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 673,431,744 |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 54,658,788 |
| 3 | 27 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 618,772,956 |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | 99,629,152 |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 38,629,152 |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 50,000,000 |
| 3 | 27 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 11.000.000 |
| 3 | 27 | 02 |  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | 86,208,800 |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 |  | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 |  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme | | 26,208,800 |
| 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | 26,208,800 |
| 1 | | | | | 2 | | 3 |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 |  | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 02 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.04 |  | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.04 | 01 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 |  | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.05 | 06 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan pakan/Pakan | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 |  | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | 10,000,000 |
| 3 | 27 | 03 |  |  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | 5,615,250,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 |  | Pembangunan Prasarana Pertanian | | 5,571,250,000 |
| 1 | | | | | 2 | | 3 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | 831,250,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | 600,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | 1,500,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 04 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | 120,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 05 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage | | 120,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | | 900,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | 1,500,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.03 |  | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan rumpun/Galur Ternak | | 22,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.03 | 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | | 22,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.04 |  | Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum | | 22,000,000 |
| 3 | 27 | 03 | 2.04 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum | | 22,000,000 |
| 3 | 27 | 04 |  |  | PROGRAM PENGEDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | 188,088,800 |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 |  | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular | | 98,088,800 |
| 1 | | | | | 2 | | 3 |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | | 98,088,800 |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 |  | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 |  | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner | | 40,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 |  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.04 | 02 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.05 |  | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 04 | 2.05 | 01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 05 |  |  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 |  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | 20,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | 2 | 3 |
| 3 | 27 | 05 | 2.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 20,000,000 |
| 3 | 27 | 06 |  |  | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 30,000,000 |
| 3 | 27 | 06 | 2.01 |  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 06 | 2.01 | 02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 06 | 2.02 |  | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 06 | 2.02 | 03 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | 15,000,000 |
| 3 | 27 | 07 |  |  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 14,479,000 |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 |  | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 14,479,000 |
| 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 14,479,000 |
|  |  |  |  |  | Jumlah | 14,928,880,551 |

**BAB V**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa tahun 2023 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga seluruh program yang direncanakan selama setahun kedepan dan kegiatan-kegiatannya merupakan turunan dari program yang ada didalam Permendagri No. 90 tahun 2019 tersebut.

Dalam Uraian Rencana Kerja (SKPD) ini kami sajikan mulai dari Bab I sampai Bab IV, yang disimpulkan berupa Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, dan disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2021 – 2026 untuk pelaksanaan pembangunan tahun depan.

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan peternakan dan perkebunan tidak mudah, maka hanya dengan tekad dan integritas para penyelenggara negara di Lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan, disertai dengan intensitas koordinasi dengan pelaksana pembangunan di daerah dan instansi terkait, maka tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan perkebunan akan dapat dicapai

Demikian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat kepada masyarakat.